

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

OPTIMALISASI KOPERASI SEBAGAI INSTRUMENT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Ginda

Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN
Suska Riau [Email: ginda@uin-suska.ac.id](mailto:ginda@uin-suska.ac.id)

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk membagi informasi tentang urgensi institusi koperasi sebagai salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi umat khususnya di masyarakat pedesaan. Karakteristik koperasi yang demikian spesifik dengan keunggulan dimensi kolektivitas, dan prinsip self help, self management dan self control serta prinsip dual identity (masyarakat sebagai pemilik dan nasabah/pelanggan) menjadikan koperasi relevan dengan kehidupan sosial masyarakat desa. Prinsip-prinsip dasar koperasi ini sekaligus menjadi modal penting dan merupakan pintu masuk dalam struktur ekonomi desa dan menjadikan koperasi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang efektif, efisien, dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi koperasi.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Koperasi, pemberdayaan.*

Abstract

This article was written to share information about the urgency of cooperative institutions as one of the ummat economic empowerment institutions, especially in rural communities. Such specific characteristics of cooperatives with the advantages of the collectivity dimension, and the principles of self help, self management and self control, and as well as the principle of dual identity (the community as owner and customer / customer) make cooperatives relevant to the social life of the village community. These basic principles of cooperative are at the same time be important assets and are the entrance to the village economic structure and make the cooperative an effective and efficient village community empowerment institution by optimizing of cooperative institution functions.

Kata Kunci : *Optimization, cooperative, empowerment.*

Pendahuluan

Membicarakan, mendiskusikan kehidupan masyarakat desa dari berbagai aspek selalu menarik bagi kalangan ilmuwan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Akademisi, dan lain-lain. Alasan penting untuk ini adalah karena masyarakat desa menyediakan berbagai informasi penting yang dibutuhkan oleh kalangan-kalangan tersebut. Informasi-informasi seperti ; pergeseran patron kepemimpinan, keterbelakangan, kemiskinan, rendahnya Sumber Daya Manusia, hubungan kota dan desa, dan lain-lain merupakan sebagian kecil dari contoh-contoh yang secara spesifik dapat diperoleh di masyarakat desa.

Banyaknya informasi yang di “sediakan” oleh masyarakat desa mengarahkan kita untuk dapat memahami pernyataan Robert Chambers bahwa rakyat adalah sumber ilmu.¹ Karena ternyata para ilmuwan, akademisi, LSM, banyak dapat memperoleh ilmu karena “belajar” kepada rakyat (masyarakat desa).

Dengan latar pemikiran yang seperti itulah, penelitian ini berangkat untuk “memahami” masyarakat desa atau menimba ilmu dari masyarakat desa tentang koperasi, kegagalan dan usaha optimalisasinya. Sebagai instrument pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Seperti diketahui bahwa, saat ini penduduk Indonesia memang terkonsentrasi di perkotaan. Sebanyak kurang lebih 56 % penduduk Indonesia tinggal di kota dan sisanya 44 % berada di pedesaan. (Tulisan compas.com). Tapi perlu diketahui bahwa, pada september 2019 penduduk miskin pedesaan 12,60 %, tapi pada maret 2020 naik mencapai 12,82 %.² artinya adalah terdapat kenaikan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan di daerah pedesaan, hampir setiap tahun.

Usaha pengentasan kemiskinan secara terus menerus dilakukan melalui perencanaan pembangunan pedesaan dan berupaya menawarkan berbagai alternatif teori yang lebih membumi serta arah kebijakan yang lebih mausiawi.

¹ Robert Chambers, *Rural Development Putting The Last First*, Terjemahan, Pepep Sudrajat, (Jakarta, LP3ES, 1978) hlm. Xvii.

² www.bps.go.id, (akses Nopember 2020).

Straetegi-strategi pembangunan yang terus menerus di perbharui dengan berbagai inovasi teori untuk lebih progresif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tapi seperti telah dijelaskan sebelumnya realitas jumlah masyarakat miskin dipedesaan tetap tidak beranjak, bahkan secara persentase cenderung mengalami kenaikan seperti yang terjadi pada priode maret 2020 tersebut. Terlepas dari polemik tentang ambang batas (toleransi) garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp. 401.220 perkapita perbulan, fakta menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan rakyat cukup tinggi dan itu di dominasi oleh masyarakat pedesaan.

Fenomena kemiskinan ini tentu bukan untuk di ratapi, sementara mencari –cari faktor penyebabnya akan selalu terpulang kepada faktor-faktor klasik (sebelumnya), yang sudah diketahui dan sangat “melekat” dengan penduduk desa, seperti faktor rendahnya sumber daya manusia (SDM), pendidikan rendah, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, kurang keterampilan, dan lain-lain yang pada intinya akan berputar-putar disitu-situ juga, bak lingkaran syetan.

Kesibukan mencari faktor penyebab kemiskinan ini, tidak jarang pada akhirnya menimbulkan perdebatan yang tidak berujung dikalangan para ahli, karena berbagai sudut pandang yang digunakan, dan terkadang di “bumbui” oleh berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya (*over lapping of interest*).

Dengan tidak mengurangi arti penting dari diskursus yang seperti ini, tentu tidak salah (dan mungkin cukup bijak) untuk menawarkan dan mengedepankan salah satu alternatif menghadapi fenomena kemiskinan masyarakat desa ini, adalah dengan mendekatkan masyarakat dengan lembaga ekonomi yang disebut dengan *koperasi*.

Koperasi mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat. Namun sering ditemukan, realita bahwa baik masyarakat maupun pengelola koperasi banyak yang tidak memahami inti koperasi yang sebenarnya, sehingga seringkali

koperasi dijalankan tidak mengikuti aturan dan norma koperasi yang sesungguhnya.

Secara teoritis relasi koperasi dengan pengentasan kemiskinan tentu tidak perlu diperdebatkan lagi. Dalam hal ini Endang Rusdianti ketika menjelaskan kemiskinan masyarakat desa melihat bahwa, dampak kemiskinan masyarakat ini dapat di kurangi dengan memberi dan memberdayakan kaum perempuan melalui *koperasi*.³ Ginda dalam jurnal Masyarakat madani juga mengemukakan dengan nada yang kurang lebih sama bahwa koperasi juga dapat menjadi solusi untuk melepaskan masyarakat dari belenggu dan cengkeraman rentenir akibat dari kemiskinan.⁴ Masyarakat dapat diberdayakan melalui koperasi.

Pemberdayaan yang pada intinya bertujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang tersedia, baik sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *net working*, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.⁵

Mungkin pertanyaan lanjutan yang melintas di benak kita adalah, kenapa harus koperasi yang menjadi solusi? Dan bukan lembaga lain, apakah dasar pemikiran yang menjustifikasi koperasi lebih baik dari lembaga lain, dan mungkin banyak pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan persoalan yang kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Tentu dapat dipahami jika persoalan ini debatable, karena masing-masing punya argument dan sudut pandang yang berbeda. Namun setidaknya-tidaknya kalau ditelusuri akan dapat dipahami argumentasi kenapa harus koperasi, jika memang berkenan memahami

³Endang Rusdianti, "Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui program pendirian dan pengembangan koperasi" Jurnal *Dinamika sosial Budaya*, vol.21, N0.2, Desember 2019, e-ISBN 2580-8542.

⁴Ginda, "Koperasi Majelis Taklim dan Pemberdayaan komunitas muslimah sebagai pemutus mata rantai rentenir di Kecamatan tampan" *Jurnal Masyarakat Madani*, vol.4, N0.2 Desember 2019, E- ISSN 2656-7741.

⁵Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 32.

anatomi koperasi itu sendiri sesuai dengan apa adanya koperasi, dan bukan bagaimana koperasi dipersepsi banyak orang.

Sesungguhnya dapat dipahami bahwa koperasi memang institusi yang paling tepat untuk memberdayakan masyarakat desa terutama mengangkat mereka dari kemiskinan, tentu dengan mengoptimalkan fungsi koperasi sesuai dengan perkembangan kultur, dan kebiasaan, pemikiran masyarakat desa.

Salah satu alasan penting yang mendasari pemikiran bahwa koperasi merupakan institusi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat desa, karena karakteristik koperasi itu yang sangat berbeda dengan lembaga ekonomi yang lain, termasuk BUMDES sekalipun. Kultur *kolektivitas* koperasi capable (sesuai) dengan kultur *kolektivitas* masyarakat desa yang masih bertahan sampai saat ini. Bagi masyarakat desa kultur kolektif yang masih kental merupakan bagian penting dari perilaku sosial budaya masyarakat hampir dalam semua lini kehidupan. Kultur *kolektif* ini merupakan pintu masuk yang utama, dan starting point dari keberhasilan koperasi sebagai salah satu solusi utama dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kultur *kolektif* yang dimiliki koperasi, hampir tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga ekonomi yang lain. Karena itu keunggulan yang dimiliki koperasi adalah, disamping sebagai lembaga ekonomi, koperasi sekaligus juga sebagai lembaga sosial.

Oleh sebab itu walaupun terjadi selama ini terdapat kegagalan atau kurang berhasilnya koperasi dalam pemberdayaan masyarakat, bukan karena eksistensi koperasi itu yang bermasalah, tapi lebih didominasi oleh ketidakmampuan para pengurus untuk menjalankan roda koperasi dalam fungsinya sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Untuk itulah tulisan ini diberi judul; Optimalisasi fungsi Koperasi dalam Pemberdayaan masyarakat desa.

Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap berbagai hasil-hasil laporan jurnal tentang koperasi, dan dibantu dengan berbagai hasil pengamatan dan pengalaman mengurus koperasi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu

berdasarkan permasalahan yang dikaji penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (riset kepustakaan). Riset kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan literature (kepustakaan) sebagai sumber utama, dan peneliti melalui bacaan penelitian harus dapat menetapkan bahan- sumber-sumber (literature) yang urgen bagi penelitian.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bermaksud mengeksplorasi jurnal-jurnal yang merupakan hasil penelitian tentang koperasi dan implementasinya dalam pengentasan kemiskinan. Disebut kualitatif karena data yang dihadapi berupa pernyataan-pernyataan verbal. Penelitian studi kepustakaan seperti ini, maka sumber datanya berasal dari literatur –literatur yang berkaitan langsung dengan materi yang dikaji dan merupakan sumber data primer penelitian.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kritis, yakni berupaya melakukan kritik terhadap sosial yang didiskripsikan dalam jurnal yang dimaksud, serta berusaha menangkap makna di balik realitas yang tidak terlihat. Pendekatan kritis memaknai proses penelitian sebagai proses kritik yang berupaya menyelidiki dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan dengan kajian ini berusaha membantu manusia mengubah kondisi dan membangun pemahaman dunia yang lebih baik.

Penelitian ini berusaha menemukan ide-ide mainstream jurnal tentang urgensi koperasi dalam pemberdayaan masyarakat, serta kelemahan-kelemahan apa yang terdapat dalam implementasi koperasi sebagai instrument pemberdayaan masyarakat. Dan dengan begitu akan lebih mudah untuk memikirkan, menemukan solusi bagi perbaikan impelementasi koperasi sebagai instrument pemberdayaan masyarakat desa.

⁶Winanrno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung, Tarsito, 1975) hlm. 243.

Sebagai penelitian kepustakaan maka sumber data primer penelitian tentu jurnal-jurnal tentang koperasi yang telah di publikasikan. Maka sumber data lainnya adalah buku-buku koperasi dan buku-buku pemberdayaan masyarakat. Jurnal kajian yang merupakan sumber data primer antara lain; tulisan tentang koperasi yang berjudul “Strategi pengentasan kemiskinan Melalui Program Pendirian dan Pengembangan Koperasi” dalam jurnal *Dinamika sosial Budaya*, vol.2, desember 2019 E-ISSN 2580, 8524. Kemudian jurnal dengan judul : Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, oleh : Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, dalam Jurnal, *NIAGAWAN*, Vol 7 No 2 Juli 2018, p-ISSN : 2301-7775 e-I014. SSN : 2579-8. Juga jurnal, dengan judul “Koperasi Majelis Taklim dalam Pemberdayaan Komunitas Muslimah sebagai pemutus mata rantai Rentenir di kecamatan Tampan” oleh Ginda, dalam jurnal *Masyarakat Madani* vol. 4, N0.2 Desember 2019, E- ISSN, 2656-7741. Dan jurnal lainnya, yang dipandang dapat menjadi sumber data primer penelitian.

Dalam proses pengumpulan data sebagaimana pendekatan penelitian *Library research*, maka di gunakan *kartu kutipan*, *kartu ihtisar* dan *kartu ulasan*, untuk mempermudah pengkategorian dan pengklasifikasikan data sesuai dengan urgensi dan bidangnya.

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah tehnik analisis data kualitatif, hal ini sejalan dengan bentuk penelitiannya yang bersifat *library research*. Tahapan analisis yang dilakukan, *reduksi data*, *display data*, dan *Verification* (penarikan kesimpulan) secara induktif.

Hasil dan Pembahasan.

Tujuan, nilai dan prinsip koperasi.

Sebelum dilanjutkan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang optimalisasi fungsi koperasi ini, perlu sedikit dipahami tentang nilai, tujuan, dan prinsip koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat memahami apa yang dimaksud dengan terminologi “koperasi sebagai instrument pemberdayaan masyarakat desa. Dua konsep penting dalam hal ini yaitu “koperasi” dan “pemberdayaan”

merupakan dua acuan konsep yang menjadi kata kunci yang harus dimengerti dan dipahami.

Kata *Koperasi* dalam tuisan ini di maksudkan sesuai dengan yang terdapat dalam UU koperasi N0. 12 Th 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan bahwa pengertian koperasi yaitu: *koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.*³

Dan pada UU No. 52 Th 1992 dijelaskan, Koperasi adalah *badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.*

Dari beberapa pengertian koprasi yang di jelaskan maka dapat dipahami bahwa koperasi adalah:

1. Kumpulan orang, bukan kumpulan modal.
2. Koperasi adalah perusahaan.
3. Memberikan pelayanan kepada anggota.

Dan dengan pengertian tersebut koperasi juga mengembangkan prinsip dasar yang umum yang menekankan prinsip; menolong diri sendiri (*self help*),⁷ prinsip; mengelola sendiri (*self management*), dan prinsip mengawasi sendiri (*self control*) yang dilakukan oleh anggota. Disini koperasi merupakan suatu wadah yang menjadi sarana merealisasikan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Sehingga melalui kegiatan kelompok tersebut, kepentingan pribadi para anggota menjadi

⁷ Muhammad Hatta, sebagai bapak koperasi mengemukakan bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang di dorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.

kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut.

Koperasi adalah badan usaha (perusahaan) yang dimiliki bersama dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, menjaga kerukunan antar sesama, bekerja untuk kepentingan bersama. Koperasi lebih menekankan pada paham kooperativisme (*cooperation based*) yang akan membentuk kekuatan yang berlipat ganda, bersinergi dalam rangka mencapai efisiensi.⁸

Paul Hubert Casselmen dalam bukunya *The Cooperative Movement and some of its Problems* mengatakan bahwa: *Cooperation is an economic system with social contrast.*” Dari definisi *Cooperation is an economic system with social contrast*, oleh Casselmen yang telah dikutip di atas, koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan satu sistem, dan sebagaimana diketahui bahwa sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermewanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota, dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.

Sementara itu terkait dengan nilai-nilai koperasi, seperti dalam pernyataan; *Cooperatives are based on the values of self help- self responsibility, democracy, equality, and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members*

⁸ Endang Rusdianti, *loc.cit.*

believe in the etical values of honesty, opennes, social reponsibility, and caring for others. (Nilai- nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini oleh anggota adalah; kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.⁹

“Prinsip”koperasi adalah, norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar mendirikan koperasi. Sebagai nilai dasar maka norma-norma ini harus menjadi acuan pokok bagi pengurus koperasi dalam mengelola, dan mengembangkan koperasi. Prinsip atau sendi dasar koperasi merupakan nilai dan norma yang membedakan koperasi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya. Secara umum prinsip dasar koperasi di dunia yang dijadikan dasar kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi Rochdale :

1. Kegiatan bersifat terbuka.
2. Pengawasan secara demokratis.
3. Bunga/jasa yang terbatas atas modal.
4. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota
5. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar.
6. Barang-barang yang dijual adalah asli dan tidak palsu.
7. Memberikan pendidikan kepada anggota secara berkesinambungan.¹⁰

Prinsip koperasi Rochdale tersebut ternyata menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi pembentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya,prinsip-prinsip koperasi tersebut berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berada.

⁹ Lihat juga, Ginda Harahap, *Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, 2017, PT.Radja Grafindo Persada,) hlm. 7

¹⁰ Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, 1999, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,) hlm. 2

Berdasarkan pada defenisi koperasi, yang dipahami sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi, dan sosial. Sebagai lembaga ekonomi maka jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan bidang usahanya. Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, jenis-jenis koperasi tersebut meliputi; *koperasi produksi*, *Koperasi Konsumsi*, *koperasi Kredit (simpan pinjam)*, dan *koperasi Jasa*.

Konsep pemberdayaan.

Istilah *pemberdayaan masyarakat* saat ini, telah merupakan “milik” semua strata masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, para pejabat, bahkan kalangan masyarakat yang secara langsung sering menjadi objek pemberdayaan masyarakat. Walaupun demikian tentu tidak ada salahnya pada tulisan ini perlu dijelaskan ulang pemaknaan terhadap istilah pemberdayaan masyarakat, paling tidak untuk pengayaan pemahaman, karena terkadang tidak tertutup kemungkinan pemaknaan terhadap istilah *pemberdayaan masyarakat* dapat berbeda bagi masing-masing orang.

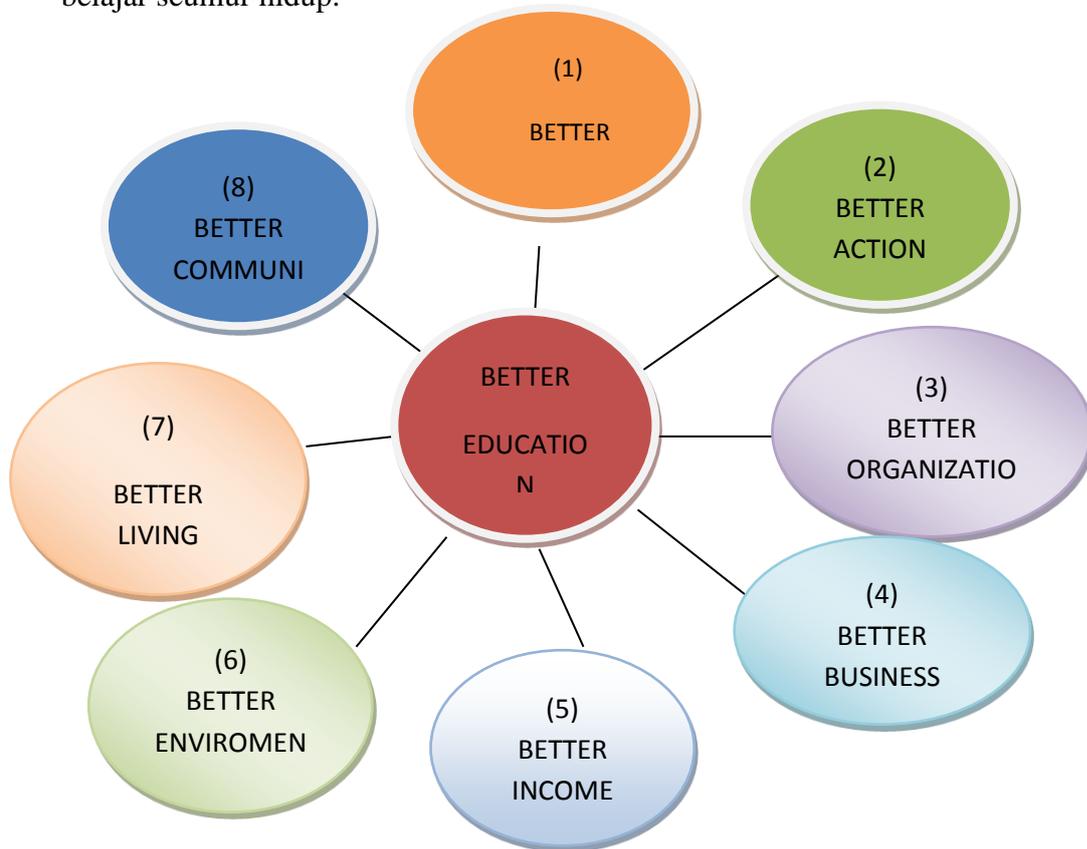
Pemberdayaan masyarakat yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang sepanjang dekade 1970-an, 1980- an hingga akhir abad ke 20.

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada pemberdayaan, pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki

program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.¹¹

Dengan mengacu pada konsep *sustainable Development*, maka proses pemerdayaan yang paling efektif adalah melalui perbaikan pendidikan. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terlepas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.



(1) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki

¹¹Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 57.

aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

(2) Perbaiki tindakan (*better action*).

Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.

(3) Perbaiki lembaga (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

(4) Perbaiki usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

(5) Perbaiki pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

(6) Perbaiki lingkungan (*better environment*)

(7) Perbaiki kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

(8) Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan social) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari penjelasan dan pemaparan yang disajikan tersebut di atas semakin di fahami bahwa pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan

yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternative pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat agar dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat yaitu (1) belajar dari masyarakat.(2) pendamping sebagai fasilitator, msyarakat sebagai pelaku, (3). Saling belajar, saling berbagi pengalaman.¹²

Secara teoritis perubahan terencana yang dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara : pemaksaan, ancaman, bujukan dan pendidikan. Pemberdayaan dengan ancaman dan pemaksaan dapat dipastikan tidak bertahan lama, demikian juga pemberdayaan dengan bujukan, hanya bisa bertahan sea-upaya lama bujukan atau insentif itu tetap ada, dan bahkan akan menyebabkan ketergantungan dan dapat mematikan kswadayaan masyarakat. Karena itu yang terbaik adalah mendesain pemberdayaan itu melalui proses belajar, atau dalam setiap proses pemberdayaan harus terkandung upaya pembelajaran, atau penyelenggaraan pelatihan maupun kursus-kursus.¹³

Dalam kontek seperti itulah pemberdayaan melalui koperasi menjadi amat urgen dan efektif. Masyarakat di berdayakan ekonomi dan sosialnya melalui koperasi, dengan memberikan kepada masyarakat pengetahuan anatomi koperasi dan pengelolaan koperasi, sehingga masyarakat dapat secara mandiri menjalankan dan mengelola bisnis koperasi.

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan

¹²Endang Rusdianti, *loc.cit.*

¹³Totok Mardikanto, *Op.cit.* hlm.67-68.

Sedikitnya terdapat dua alasan utama mengapa perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat desa masih dianggap urgen :

Pertama, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Benar bahwa di beberapa daerah ciri pedesaan itu susut perlahan bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi, akan tetapi itu tidak berarti hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota.

Kedua, kendati sejak awal tahun 1970-an pemerintah Orde Baru telah mencanangkan berbagai macam kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan yang di tandai oleh inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan.

Kesenjangan ini tentu tidak dapat di abaikan karna dapat menjadi pemicu lahirnya berbagai konflik politik, atau gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas secara berkepanjangan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Masyarakat miskin ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Meminjam istilah dan ungkapan Dr. Sanyoto Usman; kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin (the absolut poor). Kondisi mereka sungguh memprihatinkan , antara lain, ditandai oleh malnutrition, tingkat pendidikan yang rendah (bahkan sebagian masih buta huruf), rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup untuk makan . Karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka (termasuk anak-anaknya) juga berjalan agak lamban. Kelambanan itu terasa sekali ketika dalam kehidupan mereka diintroduksi ideologi dan teknologi baru yang berbeda dari yang sudah ada. Tidak sedikit dari mereka yang memberi respon yang negatif dan curiga.

Sementara itu, sisanya memiliki kondisi yang agak lebih baik daripada kelompok dalam kategori sangat miskin (the absolut poor) itu, meskipun tentu saja tetap berkategori miskin, yakni masih belum mempunyai pendapatan yang cukup untuk bebas dari kekurangan. Mereka tetap masih di lilit oleh ketidak berdayaan. Ideologi dan teknologi baru yang di perkenalkan kepada masyarakat acap kali di respons secara negatif, terutama karna tidak memiliki jaminan sosial yang cukup untuk menghadapi resiko kegagalan.

Oleh karna itu, kegiatan pembangunan perlu di arahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Nampaknya tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa. Urbanisasi dengan segala dimensinya tidak memecahkan persoalan itu. Pernyataan itu tentu saja tidak hendak mengatakan bahwa pembangunan perkotaan tidak penting, melainkan ingin memberi penekanan bahwa akses masyarakat desa pada sumber-sumber ekonomi sampai kini masih memprihatinkan. Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan kita pada masa-masa mendatang. Dan kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk di tempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan.

Oleh karena usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi

kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan, sehingga semua anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang memberi hidup mereka sengsara. Karena itu ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya juga tidak sederhana.

Maka dapat dengan mudah dipahami jika pemerintah reformasi, khususnya pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Perhatian pada pembangunan pedesaan sangat diutamakan, terbukti dengan di kecurkannya dana bantuan dua ratusan juta rupiah untuk setiap desa, guna membangun infra stuktur, Dr. Sunyoto usman menjelaskan problem-problem yang mengitari masalah desa, pada dasarnya bermuara pada masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan. Masalah-masalah pokok ini, karna tidak terselesaikan dapat melahirkan masalah-masalah lain, seperti rendahnya SDM, keterbelakangan pendidikan, meningkatnya kelompok miskin dll, meminjam istilah Robert Chambers “ kelompok pinggiran pedesaan tetap masih tersisih dan terlupakan “

2. Fungsi Koperasi sebagai institusi pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat dapat di pandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus di tempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang di hasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan

subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut; Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer yang disebut pemihakan. Upaya ini di tujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikut sertakan masyarakat (partisipasi msyrakat) yang akan di bantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karna sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang di hadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya lebih efisien.

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development).

Dengan pemikiran seperti yang di jelaskan diatas, maka koperasi menjadi instrument yang sangat potensial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Argument penting untuk menguatkan pernyataan tersebut diantara lain seperti yang disampaikan sebelumnya, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasanpada Rapat Koordinasi Nasional (Rakomas) di Jakarta pada 10 Nopember juga menegaskan koperasi dan UMKM memiliki peran strategis

yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah nyata. Mereka juga telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi. Faktanya sesuai data selama 2004-2009 dampak positif atas perkembangan Koperasi dan UMKM. Terutamanya dalam penyerapan tenaga kerja sektor Koperasi menampung sekitar 23,39%, sektor UMKM yang berjumlah sekitar 51,2 juta unit usaha atau 99,98% dari total pelaku ekonomi nasional, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97,04% dari total tenaga kerja yang terserap.

Dari konteks program pemberdayaan masyarakat desa keterlibatan koperasi bertujuan untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pedesaan. Ginandjar Karta Sasmita, pernah menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat di capai hanya dengan mengandalkan pada pertumbuhan, di perlukan upaya untuk mendorong percepatan perubahan struktural (Struktural Transformation) untuk memperkuat posisi dan peran ekonomi rakyat. Oleh karna itu diperlukan langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh yaitu membuka akses ekonomi rakyat kepada permodalan. Dengan demikian tersedianya modal-modal kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat, sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan surplus yang dapat di gunakan untuk membayar kembali kreditnya, dan melakukan pemupukan modal. Sekali lagi semakin jelas urgensi keterlibatan koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terlebi-lebih jika kajian ini menyangkut dengan masyarakat desa, terdapat sebagian besar desa-desa yang lokasinya jauh dari jangkauan lembaga-lembaga pembiayaan/ keuangan yang tersedia, seperti Bank-bank komposional. Realitas di lapangan cukup banyak desa-desa yang berlokasi cukup jauh jaraknya dari ibu kota kecamatan, sementrara lembaga pembiayaan seperti Bank hanya sampai di ibu kota kecamatan, tentu dapat di pahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa untuk meningkatkan ekonominya, lazim dalam teori ekonomi dipahami bahwa sulit untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat tanpa

keterlibatan dan ketersediaan aktif lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan yang menyertainya.

Kehadiran lembaga-lembaga keuangan (pembiayaan) yang ada di desa-desa yang telah dibuat oleh pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun UED (Usaha Ekonomi Desa) atau saat ini yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang pada intinya memang untuk membantu usaha kecil (Mikro) mendapatkan permodalan, namun ditemukan dalam laporan-laporan penelitian skripsi mahasiswa, maupun berdasarkan hasil pengamatan, masih memunculkan persoalan. Contohnya praktek KUR yang sudah berjalan beberapa tahun, ternyata masyarakat masih menemui kendala dan kesulitan mengaksesnya, akibat peraturan perbankan yang sangat ketat. Demikian juga UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) realitasnya, ditemukan banyak kredit macet. Fakta lain lagi yang ditemukan adalah sebagai mana di jelaskan Dr. Sunyoto Usman (2006) elit- elit desa yang menguasai pemilikan tanah justru lebih banyak memanfaatkan modal atau dana pinjaman dengan bunga rendah yang disediakan pemerintah, meninjau lagi istilah Robert Chambers (1983) orang-orang pinggiran yang tergolong ekonomi benar-benar lemah tetap menjadi kelompok pinggiran pedesaan yang tersisihkan dan terlupakan, mereka tetap tidak dapat menikmati dana yang disediakan pemerintah.

Dengan problema yang demikian, dan sebagai tawaran solusi tentu tidak ada salahnya menggunakan formula atau skema baru dan melibatkan koperasi dan jasa keuangan (KJK) yang terdiri koperasi simpan pinjam (KSP) serta unit-unit simpan pinjam (USP) milik koperasi dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) serta unit-unit Koperasi jasa keuangan syariah (UJKS) yang banyak dimiliki koperasi konvensional. Dengan memberikan dukungan kesediaan likuiditas agar peran mereka kuat dalam melayani pinjaman pada anggota/ calon anggota yang notabene pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Koperasi sebagai lembaga keuangan Non Bank, tetapi memiliki fungsi yang sama dengan Bank sebagai lembaga pengumpul dan penyaluran dana masyarakat memiliki nilai lebih dari lembaga keuangan lainnya, karena koperasi tumbuh dari dan untuk masyarakat, maka secara psikologis lebih dekat di hati masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (self help). Percaya pada diri sendiri (self reliance), dan kebersamaan (cooperation) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha (perusahaan) yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat desa secara luas.

Sejalan dengan UU koperasi No. 25 tahun 1992 di jelaskan bahwa peran koperasi yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan solusinya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar sebagai kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.

Maka berdasarkan pada UU koperasi N0.25 tersebut, dan melihat karakteristik masyarakat pedesaan, maka salah satu institusi yang paling tepat di kembangkan sebagai lembaga pembiayaan (keuangan) adalah koperasi dengan alasan:

- a. Koperasi adalah perusahaan, dengan ciri dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai dan karakter bagi bangsa.

b. Koperasi adalah organisasi ekonomi dan sosial yang berbasis ekonomi kerakyatan.

c. Dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa, baik yang memiliki ekonomi sedang maupun yang lemah.

Ketiga faktor diatas, yang menjadi alasan kenapa harus koperasi sangat sesuai dengan langkah-langkah dan pendekatan pemberdayaan, yang mengikuti acuan, pertama “keberpihakan”, kedua, program sesuai dengan kebutuhan, ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat, dan ke empat menggunakan pendekatan kelompok. Koperasi sebagai badan usaha (perusahaan) merupakan komunitas yang sudah terbentuk, dan sekaligus melibatkan anggota koperasi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Koperasi dalam perspektif demikian ini memiliki dua fungsi penting yaitu pertama: sebagai agen (pelaku) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, dan kedua, sebagai modal (tempat) masyarakat di budayakan. Double fungsi ini menunjukkan urgensi koperasi yang sangat tepat sebagai institusi pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, cukup beralasan jika di suatu daerah, di mana lembag koperasi ada, masyarakat sebagai anggota dan atau masyarakat pada umumnya berharap kepada Koperasi untuk bisa membantu dan berperan di dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial, dalam upaya untuk penanggulangan, pengentasan dan upaya meminimalisir peningkatan kemiskinan.⁵

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi.

Dari beberapa kajian dan pengamatan yang dilakukan terhadap kelemahan-kelemahan fungsi koperasi maka optimalisasi fungsi koperasi yang harus dilakukan adalah :

1. Optimalisasi fungsi sosial koperasi sebagai instrument pemberdayaan masyarakat desa.

Dari perspektif pemberdayaan sosial masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat yang harus di optimalkan yang dapat dilakukan oleh institusi koperasi menyangkut dengan pengembangan nilai-nilai sosial meliputi:

a. Masyarakat belajar untuk mengembangkan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini masyarakat (anggota) ikut mencoba bertanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui institusi koperasi mereka harus di aktifkan saling membantu satu sama lain. Inilah salah satu profit sosial yang diperoleh masyarakat.

b. Koperasi membentuk semangat kebersamaan. Pembentukan koperasi sebagai sebuah perusahaan membutuhkan kerjasama yang solid demi anggota masyarakat. Koperasi dibentuk dari iuran anggota masyarakat yang menjadi modal awal koperasi, di kumpul secara bersama-sama, sedikit demi sedikit, dan kemudian dengan modal kebersamaan tersebut digunakan untuk membantu sesama anggota masyarakat yang memerlukan, sehingga masalah dihadapi anggota dapat terlesaikan.

c. Koperasi mengajarkan nilai-nilai etis meliputi kejujuran, keterbukaan, kepedulian sosial dll. Nilai-nilai ini sesuai dengan nilai-nilai dasar dan prinsip koperasi.

2. Optimalisasi fungsi ekonomi koperasi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sementara dari perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, optimalisasi fungsi koperasi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Koperasi sebagai tempat menabung (Saving).

Menabung (Saving) memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Disamping sebagai tempat pemupukan modal koperasi yang dapat

dijadikan dana pembiayaan (modal) usaha, menabung juga memperbanyak investasi bagi penabung.

Bagi masyarakat desa terutama yang jauh dari ibu kota kecamatan, menabung merupakan permasalahan yang krusial karena tidak tersedianya lembaga-lembaga keuangan. Contohnya; hasil penjualan cabe 2kg hasil kebun dibelakang rumah, sekitar Rp.35.000, tidak mungkin diantar ke bank di ibu kota kecamatan yang terkadang menghabiskan biaya transportasi Rp.25.000, belum lagi waktu dan meninggalkan pekerjaan. Karena tidak tersedianya lembaga pembiayaan dan tempat menabung di desa, akibatnya uang hasil penjualan tersebut habis tidak menentu yang menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Kondisi seperti ini juga berlaku bagi seluruh anggota masyarakat desa yang jumlahnya puluhan, atau mungkin ratusan kepala keluarga (kk). Koperasi harus mengoptimalkan fungsi saving ini bagi masyarakat desa.

b. Koperasi memperkecil biaya transaksi masyarakat.

Fungsi koperasi yang kedua yang harus di optimalkan dan dapat dinikmati masyarakat desa adalah: koperasi dapat memperkecil biaya transaksi ekonomi yang dilakukan.

Ketika masyarakat melakukan transaksi jual beli di kedai koperasi, maka anggota sebagai nasabah tidak perlu lagi belanja ke pasar karena banyak komoditi yang diperlukan masyarakat tersedia di kedai (toko) koperasi. Situasi ini dapat mengurangi biaya transportasi anggota, yang seharusnya dikeluarkan ketika harus pergi ke pasar. Kemudian implementasi prinsip ekonomi koperasi, yang tidak memperbolehkan menjual barang melebihi harga pasaran, maka masyarakat dapat berbelanja di koperasi dengan harga di pasar, dan kondisi ini membuat masyarakat dapat menghemat pengeluaran dibanding belanja di kedai-kedai yang bukan milik koperasi.. Dengan begitu masyarakat dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dibutuhkan lainnya.

c. Koperasi sebagai lembaga pembiayaan. Selain fungsi koperasi sebagai tempat menabung, koperasi juga perlu mengoptimalkan fungsi sebagai institusi penyaluran dana pinjaman (kredit). Dana yang terkumpul melalui tabungan-tabungan masyarakat di koperasi, sebagian diantaranya disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) dengan jasa yang rendah sesuai hasil rapat anggota. Optimalisasi peminjaman ini dapat dilakukan dengan mendorong anggota membuka berbagai usaha produktif yang dapat didanai oleh koperasi. Pembiayaan usaha ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk skema (model), misalnya dengan cara bagi hasil, pinjaman dengan jangka waktu pengembalian agak panjang, pinjaman biasa dengan jasa yang telah di sepakati, pinjaman dalam bentuk pembelian barang, baik itu mesin produksi atau untuk barang konsumsi, dll. Pinjaman atau pembiayaan ini diberikan bagi yang membutuhkan, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak menyulitkan anggota dan sesuai dengan kesepakatan.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan koperasi kepada anggotanya, seperti pinjaman tanpa agunan, bunga yang rendah (sesuai kesepakatan), menyebabkan semua anggota dari seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan dana kredit koperasi dengan kepentingan masing-masing. Kemudahan-kemudahan ini tidak akan di proleh oleh masyarakat pada lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Bank, apalagi oleh anggota masyarakat yang benar-benar lemah secara ekonomi. Disinilah koperasi dapat menjadi tumpuan harapan masyarakat desa, untuk memberdayakan mereka dari lilitan dan jeratan kemiskinan.

d. Optimalisasi penyesuaian kondisi usaha / bisnis koperasi dengan potensi wilayah / daerah pedesaan.

Salah satu kelemahan krusial dalam pengelolaan usaha koperasi yang terjadi dimasyarakat adalah, kurang sinkronnya antara usaha /bisnis koperasi dengan potensi yang ada di desa. Misalnya di beberapa tempat di daerah Riau yang potensial dengan wilayah perairan, didirikan koperasi peternakan sapi, kambing, atau diprogramkan usaha koperasi dengan pertanian cabai, jagung,

dll. Tentu ini tidak relevan dan membuat usaha koperasi tidak maksimal. Mestinya di wilayah perairan seperti ini dikembangkan koperasi dengan berbagai usaha yang identik dengan pengembangan usaha perikanan sehingga Pemerintah tidak perlu “import” ikan dari provinsi tetangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di provinsi Riau, seperti yang terus berlangsung sampai saat ini.

Flexibilitas koperasi dalam menentukan usaha atau bisnis yang akan di tekuni merupakan kelebihan lain yang di miliki lembaga ini. Perencanaan bisnis koperasi dapat di sesuaikan dengan potensi yang dimiliki wilayah atau daerah pedesaan tertentu.. Masyarakat desa dapat membuka usaha-usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Dalam hal ini koperasi dapat menjadi institusi pembiayaan (penyalur modal= kredit) atau berfungsi menjadi penampung dan distributor hasil usaha masyarakat desa. Tentu hal ini disamping dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi desa, yang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berusaha secara lebih luas.

e. Optimalisasi fungsi koperasi sebagai instrument pengembangan usaha kecil di masyarakat desa.

Fungsi koperasi yang terkesan amat kurang dilakukan oleh lembaga koperasi khususnya di masyarakat desa adalah menjadi alat untuk dapat meningkatkan lembaga-lembaga usaha yang lebih kecil di desa-desa.

Tapi perlu di pahami dalam konteks penelitian ini, bahwa usaha kecil yang dimaksudkan tidaklah seperti yang didefinisikan oleh pemerintah dimana usaha kecil menengah tersebut adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000.- belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Akan sulit mencari usaha kecil dengan modal yang seperti itu, apa didsaerah-daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan lembaga keuangan. Karena itu pemahaman, pengertian masalah usaha kecil menengah (UKM) seperti ini tidak selalu dapat di gunakan pada usaha kecil yang terdapat di

pedesaan. “Usaha kecil” yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga, benar-benar dalam kriteria “kecil”. Kekayaan yang mereka miliki ada yang di bawah Rp.50.000.000, ada yang dibawah Rp. 10.000.000, bahkan ada yang di bawah Rp 5.000.000, Usaha kecil dengan kekayaan di bawah Rp.10.000.000, dan Rp. 5000.000.-justru yang jumlahnya mayoritas. Mereka dapat saja merupakan pedagang kelontong, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang mainan anak-anak, nelayan, pedagang ikan, dan lain-lain. Mereka adalah benar-benar pedagang “kecil”. Kecil dari sektor permodalan, kecil dari sektor bidang usaha, kecil dari sektor SDM, dll. Mereka ini mungkin tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendapatan desa secara langsung, tapi mereka adalah wira usaha yang tahan banting menghadapi berbagai gejolak dan tantangan usaha, dan jika dibina dengan baik dapat saja menjadi wira usaha yang mengangkat perekonomian dan nama desa.

Pelaku usaha kecil yang demikian ini, jelas- jelas tidak memiliki struktur permodalan yang kuat, untuk mengembangkan usaha, sementara pada sisi lainnya mereka tidak dapat memperoleh dana/ kredit perbankan karena tidak ada agunan yang akan di jaminkan, akses mereka terhadap perbankan hampir tidak ada.

Demikianlah profil singkat pelaku-pelaku usaha kecil dimasyarakat pedesaan, karena itu sangat di butuhkan kehadiran lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan- kebutuhan mereka.

Dengan gambaran (profil) singkat tentang kondisi pelaku usaha kecil yang demikian itu, apa yang dapat dilakukan dengan kehadiran koperasi, gar kopersi ini menjadi salah satu solusi penting di tengah- tengah mereka dalam upaya membantu komunitas usaha kecil tersebut dapat berkembang lebih baik, dan menjadi usaha kecil menengah seperti yang didefensisikan oleh pemerintah.

Koperasi yang berfungsi sebagai alat atau perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip kekeluargaan dan tolong menolong tentu dapat menjadi harapan dan tumpuan masyarakat. Terkait peran

dan fungsi koperasi dengan pelaku usaha kecil, yang dapat dilakukan koperasi antara lain:

1. Koperasi dapat membantu per modalan melalui penyaluran kredit simpan pinjam.
2. Koperasi dapat menjadi sarana (tempat) menabung.
3. Koperasi dapat memberikan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan dan membantu menyusun manajemen dan administrasi usaha.
4. Membantu menyediakan bahan baku bagi usaha yang menghasilkan suatu produk tertentu.
5. Membantu pemasaran hasil-hasil produksi usaha anggota.

Kelima elemen tersebut, tentu sangat membantu pengembangan usaha kecil di masyarakat pedesaan, oleh sebab itu faktor yang terpenting berikutnya adalah bagai mana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran dan fungsi serta kemampuan dan potensi koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk itu diperlukan keberpihakan pemerintah, dan elemen- elemen masyarakat lainnya, sebagai mana hal ini telah menjadi suatu pendekatan dalam pemberdayaan.

Kesimpulan.

Berdasarkan pada pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, koperasi merupakan instrument penting dalam pemerdayaan masyarakat desa. Hal itu dikarenakan karakter lembaga koperasi sangat sesuai dengan karakter sosial masyarakat desa yang kolektif dan artisipatif. Optimalisasi koperasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi –fungsi koperasi terutama yang sangat terkait dengan aktivirtas ekonomi pada masyarakat desa.

Referensi

- Abdul Bashith, 2008 Islam dan Manajemen Koperasi, Malang, UIN Malang Press.
- Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, (2018) Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, Niagawan, Vol.7 No.2 Juli , p-ISSN: 2301-7775 e-ISSN: 2579-8014.
- Ginda. Harahap, 2017, Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Depok, Jakarta, PT.Radjawali Perss
- Hendar dan Kusnadi, 1999, ekonomi Ekonomi Untuk Perguruan tinggi, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhammad Hatta, 1997, membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Kumpulan pidato Koperasi, Jakarta, Inti dayu Press.
- Nihayatus Sholichah & Mesak Paidjala (2017), Peran Koperasi dalam RangkaPemberdayaan ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan bencana di Wilayah kabupaten Tuban, Asketik, Vol.1 No. 1 Juli Universitas Dr.Sutomo Surabaya.
- Oos M Anwas, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global ,Bandung: Alfabeta.
- Pandji anorogo, 1995, Manajemen Koperasi , Teori dan Praktek, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Totok Mardikanto, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Bandung: Alfabeta.